



EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rivan Alamri¹, Asna Aneta², Yanti Aneta³

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo¹²³

E-mail: rivanalamri3@gmail.com¹; asna.atiekaneta@gmail.com²; yantianeta@ung.ac.id³

ABSTRACT

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis (1) Bagaimana pemahaman program sebagai indikator keberhasilan efektivitas BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut, (2) Untuk mengetahui menganalisis bagaimana ketetapan sasaran sebagai indikator faktor penentu keberhasilan efektivitas BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut, (3) Bagaimana ketetapan waktu sebagai indikator faktor penentu keberhasilan efektivitas BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut, (4) Untuk mengetahui bagaimana tercapainya tujuan sebagai indikator faktor penentu keberhasilan efektivitas BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut, (5) Untuk mengetahui bagaimana perubahan nyata sebagai indikator faktor penentu keberhasilan efektivitas BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemahaman program, BPNT telah berhasil dipahami dengan baik oleh masyarakat. Namun, dari aspek ketepatan sasaran, program ini masih menghadapi kendala. Masih terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan akibat data DTKS yang tidak diperbarui dan lemahnya pengawasan lapangan. Selanjutnya, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga masih menjadi masalah. Sementara itu, dari sisi tercapainya tujuan, program ini cukup efektif dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Terakhir, dari aspek perubahan nyata, program ini dinilai efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Program BPNT, Penanggulangan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan masalah yang sangat mendasar. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus senantiasa terpenuhi, sehingga menjadi hak setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan pangan. Sebagaimana yang tercantum dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 1996), pangan adalah semua benda yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun yang tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan produksi pangan yang bermutu bagi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan hak setiap orang.

Masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian utama pemerintah Republik Indonesia, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian krusial dari strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan meluncurkan program bantuan kemiskinan, yang ditujukan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, program bantuan sosial terus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bantuan sosial dari pemerintah merupakan program yang dibuat untuk memberikan dukungan finansial atau jenis bantuan lainnya kepada individu dan keluarga yang memerlukan. Sasaran utama dari bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka

kemiskinan, dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan.

Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, terdiri dari berbagai jenis. Sebagai contoh, Bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang disalurkan melalui Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam program ini, pemerintah menjangkau keluarga miskin yang ditentukan melalui kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, untuk memastikan bantuannya tepat sasaran. Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan lainnya, yang ditujukan untuk sektor-sektor tertentu.

Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, memiliki bentuk bantuan yang menjadi kesempatan pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakatnya (Kemensos RI: 2019). Namun, dari sekian banyak program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, harus diakui bahwa bantuan sosial langsung menjadi yang utama dan paling sering disalurkan kepada masyarakat. Di tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Jokowi menyalurkan bantuan sosial langsung secara tunai kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan data yang diambil langsung dari Kementerian Sosial (Kompas: 2024). Hal ini membuat anggaran pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Di tahun 2024, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk bantuan sosial mencapai Rp157,3 Triliun. Angka ini mengalami penambahan sekitar Rp10,8 triliun, atau meningkat sebanyak 7,4%

dibandingkan dengan realisasi pembelanjaan bantuan sosial pada tahun 2023 (Databoks:2024).

Penyaluran anggaran BNPT ini, dilakukan oleh pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai, ke berbagai Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, penyaluran BNPT mengikuti regulasi Kementerian Sosial tersebut, di mana BNPT diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM), yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-ng), yang senantiasa diperbaharui oleh Operator SIKS-NG yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, di Provinsi Sulawesi Utara.

Temuan awal dari observasi yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan bahwa pernyataan dari informan yang berperan sebagai pendamping BPNT mengindikasikan bahwa pemahaman program BPNT belum efektif, terutama karena terdapat keterlambatan dalam waktu penyaluran dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, Ketepatan Sasaran dalam Bantuan Pangan Non Tunai tidak memenuhi harapan. Dalam konteks ini, Ketepatan Waktu Dalam BPNT tampaknya melibatkan interaksi antara kedua belah pihak, yang mungkin mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi

partisipatif dan studi dokumen, yang sifatnya interpretatif, yaitu untuk memahami makna dan tafsiran yang terkandung dalam niat pelakunya. Sifat interpretatif ini dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi sesuai fokus penelitian yaitu Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Bolangitang Barat.

Deskriptif Kualitatif merupakan salah satu bentuk kualitatif yang berusaha mendeskripsikan suatu latar (setting) atau objek tertentu secara terinci dan mendalam. Rancangan ini dipilih dengan pertimbangan: (1) menyelidiki fenomena yang terjadi dan berlaku di dalam konteks yang diteliti yaitu Efektivitas Pemberian Bantuan BPNT Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut; (2) dalam rancangan ini memanfaatkan berbagai sumber data semaksimal mungkin agar kredibilitas dan validitas hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang mengurangi efektivitas program BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut: 1) Efektivitas program BPNT diukur melalui pemahaman program sudah efektif. Tahap ini melibatkan edukasi dan sosialisasi dari dinas sosial sehingga masyarakat dapat memahami tata cara pengaduan, pemanfaatan program dan tata cara menerima bantuan beras serta non tunai. 2)

Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat, belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran. adanya ketidaksesuaian antara data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Banyak keluarga miskin yang layak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam data, sementara sebagian penerima tidak sepenuhnya memenuhi kriteria. 3) Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat, masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Ketidaksesuaian waktu penyaluran dengan jadwal yang telah ditetapkan berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat serta mengurangi tujuan utama dari program ini dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. 4) Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat, telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama dalam hal membantu mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pangan. 5) Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bolangitang Barat, telah dirasakan secara signifikan oleh KPM. meskipun masih terdapat tantangan, seperti pendistribusian yang belum merata dan sistem pendataan yang perlu disempurnakan, dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan

dalam ketahanan pangan telah dirasakan masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Efektivitas program BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di kecamatan bolangitang barat bahwa Program BPNT cukup efektif sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Kecamatan Bolangitang Barat. Namun, perbaikan masih diperlukan, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran, agar efektivitas program dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.

Meningkatkan efektivitas program BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di kecamatan bolangitang barat maka peneliti dapat memberikan masukan yang pertama, Pemutakhiran dan Validasi Data DTKS Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, perlu secara rutin memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat agar bantuan BPNT benar-benar tepat sasaran. Pendamping program perlu diberikan pelatihan lebih lanjut agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan yang efektif kepada KPM. Kemudian Perbaikan Sistem Penyaluran, Penguatan Pengawasan dan Transparansi dalam Dorongan Kemandirian KPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. A. (2017). Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan.
- Adisasmita, Raharjo.2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budiani, N. W. (2007). Efektifivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. Jurnal ekonomi dan sosial input, 49-57.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2019 Kebijakan Publik Formulasi ,Implementaasi dan evaluasi.Jakarta : PT Eles Komputindo Kelompok Gramedia.
- Keban, Y. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur 2019.Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. PT.Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Marsuarian, Restu (2017). *Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Penyawakan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Makmur 2019. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. PT.Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Sutrisno. (2010). Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.